



# RAISING THE BAR AND SAY IT RIGHT

On Becoming Valued and Trusted Advisor

## LAPORAN WORKSHOP EKSEKUTIF

*THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITOR INDONESIA*

***'RAISING THE BAR & SAY IT RIGHT'***

**Bali, 21-22 Februari 2017**

📍 Hotel Conrad Bali  
**21-22 FEBRUARI  
2017**

**WORKSHOP  
EKSEKUTIF**

**INSPEKTORAT UTAMA**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**2017**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penguatan fungsi pengawasan intern merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan intern Inspektorat Utama, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*Good Governance*). Sejalan dengan amanah RPJMN mengenai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka diperlukan Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

Transformasi kelembagaan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, telah meneguhkan penguatan pengawasan intern dari eselon III (Bagian) menjadi eselon I, yaitu Inspektorat Utama. Tuntutan peran optimal Inspektorat Utama untuk melakukan fungsi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya yang lebih menekankan pada penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan fungsi konsultan (*counsultancy*) harus dibarengi dengan peningkatan kapabilitas auditor.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Dalam mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan, efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai, dalam RPJMN 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3. Berdasarkan self assessment atas kapabilitasnya, APIP akan memperoleh gambaran tentang *areas of improvement* yang akan dijadikan sebagai dasar oleh APIP dalam menyusun rencana tindak peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP yang efektif.

Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dilakukan antara lain dengan mengikuti Workshop yang diselenggarakan oleh IIA yang bertujuan untuk

memperoleh informasi *Best Practice* tentang berbagai perkembangan terkini penerapan regulasi dan ilmu pengetahuan tentang pengawasan intern. Selain itu juga membangun networking sesama profesi dan memperoleh data/informasi sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas Inspektorat Utama. Berkenaan dengan hal tersebut, Inspektorat Utama melalui Surat Tugas Nomor: IU/03007/SETJEN DPR RI/02/2017 tanggal 16 Februari 2017 menugaskan:

1. Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
2. Djoko Hanggoro, S.T.
3. Denny Romadhon, S.E.

Untuk mengikuti workshop eksekutif dengan topik *'Raising The Bar and Say It Right On Becoming Valued and Trusted Advisor'* yang diselenggarakan oleh IIA di Tanjung Benoa, Bali pada tanggal 21-22 Februari 2017.



## **B. LANDASAN HUKUM**

Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Utama melalui keikutsertaan dalam workshop sesuai :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan dari keikutsertaan dalam Workshop IIA adalah memperoleh informasi *Best Practice* tentang peran APIP yang efektif dan memperoleh data/informasi sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif, dan meningkatkan kapabilitasnya. APIP pada setiap instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupi. Mengakibatkan APIP di Indonesia memiliki kapabilitas yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pola umum pengembangan kapabilitas APIP yang dapat digunakan sebagai langkah yang logis dalam mewujudkan APIP yang efektif, sesuai sasaran yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

### **D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan mengikuti Workshop IIA dengan topik '*Raising The Bar and Say It Right On Becoming Valued and Trusted Advisor*' dilaksanakan pada tanggal 21-22 Februari 2017 bertempat di Hotel Conrad, Jl. Pratama 168 Tanjung Bena, Bali.

Adapun Pembicara/Narasumber kegiatan workshop tersebut:

1. Gerald Cox : CEO South West Audit Partnership, Past Chairman of The Global IIA 2007-2008.



2. Phil Tarling : Vice President Internal Audit Centre of Excellence, Past Chairman of The Global IIA 2012-2013.



3. Rudy Rudy Hartono, MM, CFE, CCPS, QIA : Chief Audit Executive of Perum Bulog.



4. Enjang Mukhtar, MAF, CIA, CCSA : Manager in the Commercial and Business Development Department, Head of Internal Audit in an International Oil and Gas Company.



## BAB II HASIL WORKSHOP

Pelaksanaan Workshop Executive IIA pada tanggal 21 Februari 2017 di Ballroom Hotel Conrad, Tanjung Benoa, Bali. Pembukaan workshop pada pukul 08.30 WITA dilanjutkan dengan presentasi yang dibawakan oleh Narasumber. Bertindak selaku Moderator adalah Sdr. Rudy Hartono, MM. (CAE Perum Bulog).

### I. “**RAISING THE BAR**” by Gerald Cox



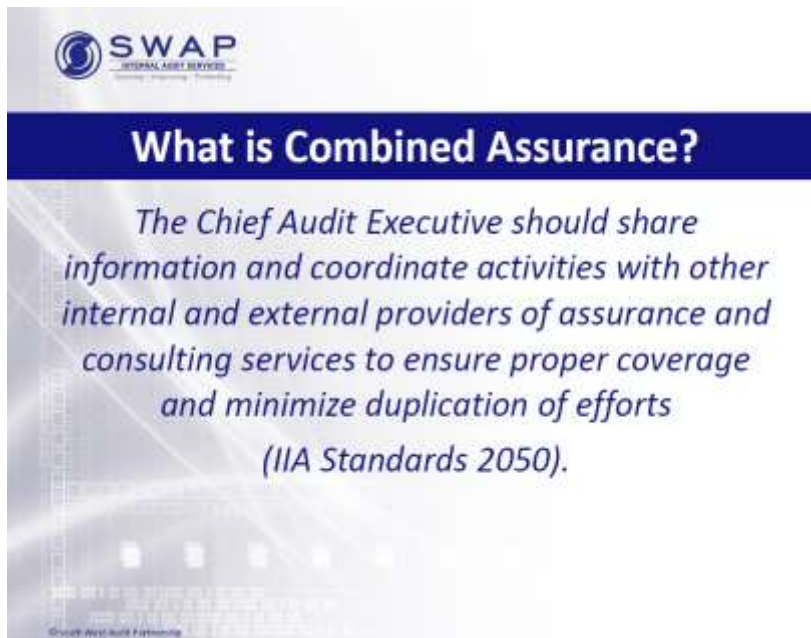
***Raising the Bar*** diterjemahkan menjadi Meningkatkan Standar/Kualitas merupakan suatu cara pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan Audit Internal. Peningkatan tersebut dilakukan dengan membuat suatu Rencana Audit Internal Tahunan berdasarkan Penilaian Risiko (*Risk Based Internal Audit/RBIA*) serta melakukan Penjaminan Gabungan (*Combined Assurance*).

Sumber penjaminan (*assurance*) berasal dari : pengawas eksternal, regulasi/peraturan di bidang pengawasan intern, departemen kepatuhan (SPI), manajemen risiko, kesehatan dan keamanan.

Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menghindari duplikasi dalam pelaksanaan internal audit, mengurangi biaya yang tinggi terutama IT, terlalu banyak penjaminan, serta agar fokus pada risiko yang nyata/riil.

Pendekatan Internal Audit harus dirubah karena tidak cukup hanya melakukan pengendalian dan tersedianya penjaminan, namun penjaminan harus memperhatikan efektivitas dari manajemen risiko.

Rencana Audit Tahunan harus memperhatikan kebutuhan audit berdasarkan penilaian risiko dan sumber daya termasuk anggaran/biaya untuk pelaksanaan audit.



Penjaminan Gabungan (*Combined Assurance*) yaitu Chief Audit Executive (CAE) harus memberikan data dan informasi kegiatan kepada Pengawas Internal dan Eksternal untuk memastikan kelayakan cakupan audit dan meminimalisir duplikasi pelaksanaan audit.

Keuntungan dari Combined Assurance :

- Efisiensi Pengendalian yang optimal;
- Optimalisasi penjaminan kepada Komite Audit dan Manajemen.



## II. "SAY IT RIGHT" by Phil Tarling



Komunikasi sangat penting bagi Internal Audit dalam hal :

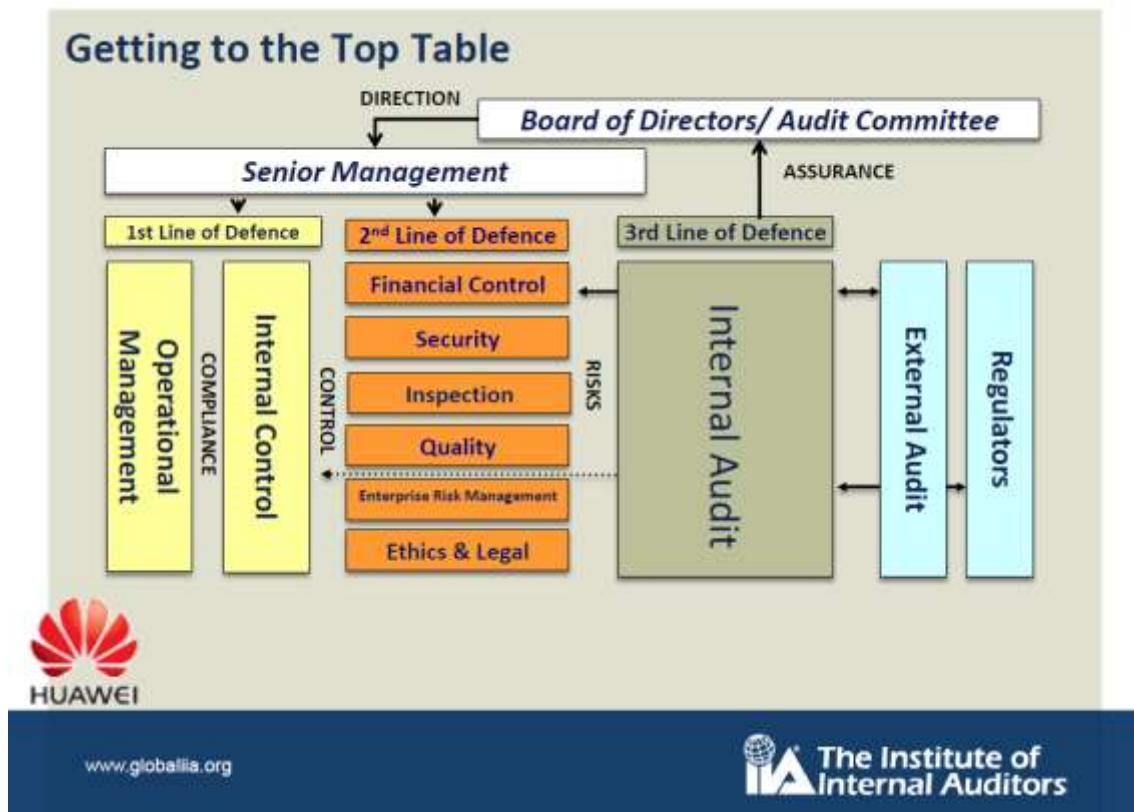
- Fokus pada risiko;
- Bertekad untuk memberikan solusi/saran;
- Tidak bersembunyi di balik kebebasan;
- Mengindari sela-sela/sambilan;
- Terlibat dalam keberhasilan dan kegagalan organisasi.

Komunikasi yang dilakukan oleh internal auditor tidak hanya agar masyarakat mendengarkan, namun harus mengatakan itu benar (kebenaran).

Dalam konsep Three Line of Defence peran internal audit adalah mengidentifikasi kelemahan dalam First Line dan Second Line of Defence dan hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan organisasi.

Internal audit sebagai Third Line of Defence menyampaikan hasil pengawasan sebagai masukan kepada Komite Audit dan Top Manajemen.





Risk Based Internal Audit (RBIA) merupakan metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan manajemen risiko keseluruhan organisasi. RBIA memungkinkan internal audit untuk menyediakan penjaminan kepada manajemen dengan pendekatan manajemen risiko dan penilaian risiko.

Pelaksanaan internal audit yang menggunakan metodologi RBIA harus dapat memberikan wawasan terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik (*governance*).

Untuk meningkatkan kualitas hasil internal audit diperlukan komunikasi yang baik dengan manajemen baik secara langsung maupun melalui Komite Audit. Disamping itu, internal audit perlu mendengarkan masukan dari Eksekutif Senior/ Top Manajemen, serta memahami pesan yang disampaikan. Kemudian internal audit harus menyampaikan kepada orang yang benar, dan laporan yang disampaikan harus ringkas dan jelas.

Internal audit harus menjadi penasehat (*advisor*) bagi manajemen dan harus melakukan interaksi informal secara rutin dengan Komite Audit. Internal audit tidak hanya menyajikan laporan hasil audit, tetapi juga harus mendiskusikan permasalahan dengan Eksekutif Senior. Komunikasi dengan manajemen senior membahas risiko yang sering muncul dan dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Oleh karena itu Tim Internal Audit harus mampu melakukan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan standar dan kualitas internal audit.

### III. **“AUDITING ETHICS” by Gerald Cox**



Kebijakan Etika yang penting :

1. Menunjukkan dukungan kepada Manajemen dan Pimpinan Organisasi;
2. Kejelasan total, tidak ada kemenduaan;
3. Memberikan solusi yang layak/wajar dan singkat;
4. Terintegrasi dengan tata kelola pemerintahan lainnya;
5. Terintegrasi dengan staf/pegawai dan kode etik lainnya;
6. Tertanam dalam budaya organisasi;
7. Terukur, harus dapat menilai kepatuhan.

Kebijakan Etika meliputi :

- Ikhtisar, pernyataan keseluruhan mengenai Etika Organisasi;
- Siapa yang mencakup kebijakan, harus secara eksplisit menjelaskan mencakup seluruh pegawai;
- Rincian kebijakan, apa yang pegawai harus lakukan untuk memenuhi;
- Akuntabilitas, secara rinci menjelaskan siapa dan bagaimana dugaan pelanggaran akan diinvestigasi, siapa yang melaporkan dan sanksi-sanksi.

Apa yang termasuk Kebijakan Etika :

- ❖ Bertindak dengan kejujuran dan integritas;
- ❖ Menyatakan semua kenyataan dan potensi konflik kepentingan;
- ❖ Semua pengaduan masyarakat adalah lengkap, jujur, akurat, tepat waktu dan dapat dipahami;
- ❖ Kepatuhan terhadap hukum, peraturan/regulasi dan kebijakan;
- ❖ Bagaimana Kebijakan Etika akan dipromosikan, dikomunikasikan, diimplementasikan dan terukur;
- ❖ Bagaimana kepentingan dapat dinyatakan tanpa rasa takut terhadap retribusi;
- ❖ Bagaimana tersangka penyimpangan akan dilaporkan, diinvestigasi dan diselesaikan dengan tegas.

Dalam pelaksanaan audit dapat menjadi pelopor untuk mendukung budaya organisasi yang positif dan sebagai penggerak untuk membangun kebijakan etika organisasi. Di samping dapat dilakukan reviu untuk memastikan bahwa budaya etika organisasi ditaati oleh manajemen.

Menurut Standar 2110 tentang Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*), Audit Internal harus memajukan nilai dan etika organisasi. Pelaksanaan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian dalam Standar 2110A, pelaksanaan audit internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas pelaksanaan Etika Organisasi terkait tujuan, program dan kegiatan organisasi.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam audit internal adalah:

- Apakah terdapat Kode Perilaku resmi yang komprehensif dan mudah dipahami;
- Komunikasi tentang Etika Organisasi, apakah Pimpinan dan manajemen secara rutin dan jelas memaparkan harapan dari etika organisasi, disertai bukti efektivitas dalam proses pelaksanaannya.
- Kebijakan etika strategis, seberapa sering telah direviu. Apakah masih relevan dan sesuai serta komprehensif. Apakah terdapat bukti bahwa semua pegawai mengerti mengenai kebijakan etika.

#### IV. "AUDITING CULTURE" by Phil Tarling

## Auditing Culture

IIA Indonesia  
Seminar and workshop

21-22 February, Conrad Hilton,  
Bali

Phil Tarling,  
Vice President, Internal Audit Centre of Excellence, Huawei  
Former Chairman of the Global Institute of Internal Auditors



BUILDING A BETTER CONNECTED WORLD

Huawei Confidential



Kultur adalah ide-ide, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku sosial dari masyarakat atau orang tertentu. Sedangkan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang menentukan perilaku orang atau dalam melakukan aktivitas.

Terdapat beberapa area yang berpotensi untuk dievaluasi :

- ✚ Rekrutmen pegawai;
- ✚ Pelantikan pejabat;
- ✚ Arahan pimpinan organisasi;
- ✚ Keyakinan pegawai;
- ✚ Proses bisnis organisasi;
- ✚ Bagaimana kebijakan dan prosedur diawasi;
- ✚ Penjualan;
- ✚ Perilaku bisnis;

### ***How to audit Culture***

***Moral Principles*** govern ***Behaviour***

In an organisation ***Moral Principles*** are the  
***Culture***

The Culture has to promote Ethical Behaviour

Culture in an organisation comes from the ***TONE***  
***AT THE TOP***

***Internal Audit has to evaluate the Culture that is***  
***being promulgated in the organisation***

BUILDING A BETTER CONNECTED WORLD

Huawei Confidential



## V. “On Becoming Valued and Trusted Advisor” by Rudy Hartono



Harapan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap internal audit :

- 1) Memahami misi, strategi dan tujuan organisasi serta risiko yang dihadapi proses bisnis organisasi;
- 2) Melakukan penugasan Assurance dan Advisory secara obyektif, terpercaya dan dapat diandalkan;
- 3) Berkoordinasi dengan *second line of defense*;
- 4) Membangun hubungan baik dengan manajemen/BOD;
- 5) Posisinya terstruktur secara properly dalam organisasi;
- 6) Mengkomunikasikan hasil observasi dan opininya secara berkala, komunikasi dilakukan secara verbal, tidak hanya tertulis.

Transformasi dalam Perencanaan Audit dari Conventional Audit ke Risk Based Internal Audit (RBIA).

	<i>Conventional Audit</i>	<i>Risk based Internal audit</i>
<b>FUNGSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan audit berdasarkan siklus keuangan</li> <li>• Audit program disusun berdasarkan hasil audit masa lalu saja</li> <li>• Audit program tidak mempertimbangkan perkembangan bisnis saat ini</li> <li>• Masih sangat fokus pada <i>compliance audit</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan audit disusun dengan mempertimbangkan juga hasil konsultasi dengan manajemen</li> <li>• Audit program bersifat dinamis – fokus audit lebih menggunakan pendekatan proses bisnis</li> <li>• Audit program didesain untuk inisiatif bisnis baru</li> <li>• Fokus pada isu-isu yang mempunyai dampak bisnis sehingga proses audit dapat lebih cepat dan efisien</li> </ul>
<b>PERAN</b>	<i>Compliance</i>	<i>Assurance &amp; Business Advisory</i>

**2 Penambahan Penugasan Advisory pada engagement yang dilakukan SPI BULOG**



<b>Penugasan Audit Operasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menilai efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan asset perusahaan.</li> </ul>
<b>Penugasan Audit Kinerja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mereviu atau mengulas perencanaan dan pelaksanaan program kerja masing-masing unit kerja dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan.</li> </ul>
<b>Penugasan Audit Teknologi Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan (availability), kerahasiaan (confidentiality) dan keutuhan (integrity) dari sistem informasi organisasi.</li> </ul>
<b>Penugasan Audit Khusus (Investigasi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan investigasi dan pemeriksaan khusus terhadap kasus yang berindikasi adanya kecurangan (fraud) sebagai pendalaman atas rekomendasi jenis penugasan audit lainnya yang mengarah ke potensi terjadinya fraud.</li> </ul>
<b>Penugasan Konsultasi (Advisory)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemberian advis (nasihat) dan jasa lain untuk memberi nilai tambah ke organisasi, meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses-proses pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen kepada auditor internal.</li> </ul>

Ruang lingkup implementasi dari internal audit termasuk tetapi tidak dibatasi pada :

1. Audit aktivitas manajemen dengan tujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan informasi dan laporan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengamankan aset barang milik negara.
2. Evaluasi kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko, termasuk sistem dan data komputer/manual untuk menilai ketaatan terhadap kebijakan.
3. Melakukan Audit Investigatif dan Audit dengan Tujuan Tertentu dalam kasus ada indikasi kecurangan (*fraud*).
4. Merevisi perencanaan dan implementasi program kerja dari masing-masing unit kerja dan menilai kesesuaian dengan tujuan organisasi.
5. Melakukan evaluasi dari Penilaian Risiko, antara lain :
  - Meyakinkan bahwa risiko telah dikelola oleh organisasi, diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, ditangani, dipantau dan dikomunikasikan.
  - Melakukan reuiu kecukupan manajemen risiko telah diterapkan pada organisasi, sebagai bahan masukan pada manajemen dan Pimpinan.

Auditor internal dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang akan merusak nama baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian dari auditi yang dapat mempengaruhi keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
4. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

## **VI. “Internal Audit Role in Order to Develop an Ethical Corporate Culture” by Enjang Mukhtar**

Definisi Audit Internal menurut IIA adalah :

“Kegiatan Penjaminan (*Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini membantu pencapaian tujuan organisasi dengan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola pemerintahan yang baik.”

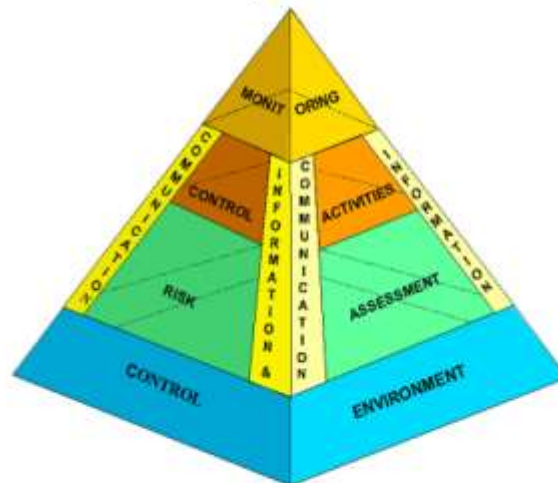
Sedangkan definisi Pengendalian Internal menurut COSO adalah :

“Proses yang dipengaruhi oleh entitas yang terdiri dari Pimpinan, manajemen dan pegawai, yang dirancang untuk menyediakan penjaminan yang wajar sehubungan dengan pencapaian tujuan berikut : (i) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; (ii) kehandalan laporan keuangan, serta (iii) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

## The five components of Internal Control System

Internal control consists of five interrelated components:

- A. **Control environment**
- B. Risk Assessment
- C. Control Activities
- D. Information and Communication
- E. Monitoring



(source : COSO, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

6

Tujuan dari Kode Etik (IIA) adalah untuk memajukan budaya etika dalam profesi internal audit.

Auditor internal harus melakukan pekerjaan mereka dengan :

- Integritas;
- Objektivitas;
- Kerahasiaan (Confidentiality);
- Kompetensi.



## IA Role in Life-Cycle Ethics Program



18

Etika dalam Pengambilan Keputusan penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Beberapa keputusan jelas dan mudah untuk dibuat, namun beberapa tidak mudah. Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, pertanyaan di bawah ini dapat membantu untuk membuat keputusan yang benar :

- ✓ Apakah hal tersebut Legal?
- ✓ Apakah konsisten terhadap kebijakan organisasi termasuk hak asasi manusia?
- ✓ Apakah konsisten terhadap nilai-nilai organisasi?
- ✓ Apabila menjadi konsumsi publik, apakah terasa nyaman?



### BAB III

### KESIMPULAN

1. *Combined Assurance* memiliki keuntungan yaitu : Efisiensi Pengendalian yang Optimal serta Optimalisasi Penjaminan kepada Komite Audit dan Manajemen;
2. Tim Internal Audit harus mampu melakukan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan standar dan kualitas internal audit;
3. Audit Internal harus memajukan Nilai dan Etika organisasi. Pelaksanaan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi;
4. Budaya organisasi yang merupakan prinsip moral organisasi tergantung kepada komitmen Pimpinan (*Top Management*). Budaya organisasi harus memajukan perilaku Etika dan Nilai. Audit internal harus mengevaluasi budaya organisasi yang telah disosialisasikan dalam organisasi;
5. Perubahan paradigma internal audit saat ini diharapkan melakukan Assurance dan Advisory secara obyektif, terpercaya dan dapat diandalkan, untuk memberi nilai tambah bagi organisasi, meningkatkan Governance, manajemen risiko, dan proses-proses pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen kepada auditor internal;
6. Etika dalam Pengambilan Keputusan penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Internal audit diperlukan untuk membantu membuat keputusan yang benar, konsisten terhadap kebijakan organisasi termasuk hak asasi manusia, konsisten terhadap nilai-nilai organisasi serta mendukung transparansi publik.

INSPEKTUR UTAMA,

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.  
19620719 199803 1 002

**Jadwal Executive Workshop: Raising The Bar and Say It Right**

No	Tanggal	Waktu	Acara
1	21 Februari 2017	08.30 – 09.15	“Raising The Bar” by Gerald Cox
2		09.15 – 10.00	“Say It Right” by Phil Tarling
3		10.00 – 10.30	Coffee Break
4		10.30 – 12.00	Q & A Panel
5		12.00 -13.00	Lunch Break
6		13.00 – 13.45	“ Auditing Ethics” by Gerald Cox
		13.45 – 14.30	“Auditing Culture” by Phil Tarling
7		14.30 – 15.00	Coffee Break
8		15.00 – 16.30	Q & A Panel
9	22 Februari 2017	08.30 – 10.00	“Interpreting The Message” by Rudy Hartono & Mohamad Hassan
10			
11		10.00 – 10.30	Coffee Break
12		10.30 – 12.00	Q & A Panel
13		12.00 -13.00	Closing & Lunch